

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Republik Indonesia. (n.d.). *Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Australian Standard/New Zealand Standard 4360:1999*. (1999). Sydney: Risk Management Guidelines.
- Australian Standard/New Zealand Standard 4360:2004*. (2004). Sydney: Risk Management Guidelines.
- Fraser, J., & J. Simkins, B. (2010). *Enterprise Risk Management*. Canada : John Wiley & Sons .
- Mario ,F , T. (1998). *Elementary Statistics* (7th ed.). New York: Addison-Wesley.
- ramli, s. (2010). *Pedoman Praktis manajemen Risiko Dalam Prespektif K3*. Jakarta : PT.Dian Rakyat.
- Ridley , J. (2008). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Ketiga ed.). Jakarta: Erlangga.
- Suardi, R. (2005). *Sistem Manajemen Kesehatan kerja*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung .
- Sunaryo, T. (2007). *Manajemen Risiko Finansial* (Vol. empat). Jakarta : Salemba.
- Syah, M. I. (2015). *pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum upaya hukum masyarakat yang terkena pembebasan dan pencabutan hak* (Vol. III). Jakarta : Permata Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia . (n.d.). *Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1999 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3)*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No.99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat(3).*

Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No.2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*